

BIROKRASI SIPIL DAN MILITER: DOMINASI AKTOR MILITER DALAM TUBUH KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

¹ Genta Dwi Pebriawan, ² Khoirul Alim, ³ Maulida Puteri Fatmawati, ⁴ Mochammad Toyib
^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

¹ Email: gentadp3@gmail.com,

² Email: alimkhoirul739@gmail.com,

³ Email: maulidaputeerr@gmail.com,

⁴ Email: toyiiibb@gmail.com

DOI: dx.doi.org/10.30742/juispol.v3i2.3481

Abstrak

Penulisan dari artikel ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dari birokrasi militer di Indonesia khususnya pada Departemen Kementrian Pertahanan (Kemenhan). Dan dalam proses penyusunannya terinspirasi dari sebuah jurnal karya Yusa Djuyandi dan Muhammad Gufran Ghazian yang menyoroti banyaknya pensiunan atau bahkan yang masih bekerja pada wilayah militer masuk dalam stuktural lembaga negara, dan yang menjadi obyek dalam penelitian tersebut adalah Kemenhan. Namun dalam pembahasan artikel ini mengambil sub materi mengenai bentuk tatanan pada Kemenhan dan birokrasi militer di Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan secara studi literatur dengan mengumpulkan dokumen-dokumen literasi dari berbagai bentuk seperti jurnal, e-book, website yang telah dikomparasikan sehingga menemukan hasil data yang bisa digunakan untuk penyusunan artikel ini. Temuan dalam artikel ini meskipun dalam struktur kepemimpinan di Kemenhan terdapat banyak alumni dari militer namun tidak mengindikasikan bahwa lingkup yang tercipta pada lingkungan Kemenhan bersifat kaku dan keras seperti lingkungan militer. Pada struktur badan Kemenhan memiliki bentuk yang telah ditetapkan sesuai dengan keputusan oleh pemerintah yang menjabat saat itu dan bisa berubah sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Untuk saat ini fungsi Kemenhan adalah sebagai kordinator dalam wilayah pertahanan negara yang bertanggung jawab langsung kepada presiden, menyediakan dan menetapkan segala hal dan kebutuhan dari angkatan bersenjata Indonesia dalam menjaga pertahanan negara.

Kata Kunci: birokrasi, birokrasi militer, dwifungsi ABRI

Abstract

The writing of this article aims to find out the form of the military bureaucracy in Indonesia, especially in the Ministry of Defense (Kemenhan). And in the process of compiling it, it was inspired by a journal by Yusa Djuyandi and Muhammad Gufran Ghazian which highlighted the many retirees or even those still working in the military area who were included in the structure of state institutions, and the object of this research was the Ministry of Defense. However, in discussing this article, it takes sub-material regarding the form of order in the Ministry of Defense and the military bureaucracy in Indonesia. The data collection technique was carried out by means of a literature study by collecting translation documents from various forms such as journals, e-books, websites which have been compared so as to find the resulting data that can be used for the preparation of this article. The findings in this article, although in the leadership structure at the ministry of defense there are alumni from the military, their absence indicates that the environment created within the ministry of defense is rigid and hard like that of the military. The structure of the Kemenhan body has a form that has been determined according to a decision by the government in office at that time and can change according to the rules set. For now the function of the ministry of defense is as a coordinator in the area of national defense who is directly responsible to the president, providing and stipulating everything and the needs of the Indonesian armed forces in maintaining national defense.

Keyword: bureaucracy, military bureaucracy, ABRI dwifuntion

PENDAHULUAN

Penjagaan dalam pertahanan di Indonesia dilakukan oleh seluruh warga negara, namun terdapat tugas khusus yang diberikan kepada organisasi yang memang memiliki tugas utama dalam menjaga pertahanan Indonesia baik secara eksternal dan internal. Wilayah militer memiliki fungsi tersebut, namun dalam wilayah pemerintahan juga memiliki departemen tersendiri dalam mengurus pertahanan negara yaitu Kemenhan (kementerian pertahanan) yang berfungsi untuk membantu presiden dalam menjaga dan menyuplai segala hal kebutuhan dan menetapkan aturan dan perundang-undangan mengenai pertahanan di Indonesia. Dalam hal pertahanan, Indonesia mengalami perubahan besar dan memiliki sejarah panjang. Yang lebih tepatnya terjadi pada masa Orde baru (Prihatanti et al., 2013).

Pada masa orde baru, keterlibatan badan pertahanan keamanan atau militer memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam pemerintahan, bahkan bisa dibilang memiliki fungsi ganda, bukan hanya menjalankan fungsi sebagai menjaga pertahanan negara namun juga ikut dalam proses kegiatan sipil di wilayah pemerintahan. Ikt dalam pembangunan, ekonomi, yang mana seharusnya wilayah tersebut merupakan bagian tersendiri dan bukan wilayah militer (Hasudungan, 2021). Dalam keikutsertaan atau campurtangan tersebut menimbulkan banyak respon positif dan negatif dari kacamata publik. Pada masa orde baru, keikutsertaan angkatan militer dalam kancah perpolitikan Indonesia dikarena tidak mampunya politisi sipil dalam menjalankan pemerintahan yang mana akhirnya menyebabkan presiden mengikutsertakan militer guna membantu dalam menjaga stabilitas politik negara. Nilai positif dalam hal ini pesatnya dalam hal pembangunan negara dan berkembangnya ekonomi negara, namun adanya perebutan kekuasaan menjadi satu hal yang muncul di akhir episode dan menjadi episode paling

panjang dan alot. Dengan beberapa peristiwa adanya perbedaan pandangan dari politisi sipil dan militer dalam menetapkan suatu kebijakan yang menyebabkan ketegangan baru dan dalam durasi lama (Anwar, 2020).

Namun dwifungsi ABRI dalam negara Indonesia telah selesai dan wilayah militer Kembali pada tugasnya sendiri dalam menjaga stabilitas pertahanan Indonesia. Meskipun begitu terdapat pada lembaga pemerintahan yang mengkoordinir sebuah pertahanan negara yakni departemen kementerian pertahanan yang bertanggung jawab secara langsung kepada presiden dalam hal urusan pertahanan negara. Dan hal tersebut sesuai dengan peraturan presiden. Dalam susunan hierarkisnya, jika dilihat terdapat aktor militer di dalam batang tubuh Kemenhan. Hal itu terjadi diupayakan agar fungsi dari kemenhan sesuai dan tepat sasaran jika orang yang menempati posisi tersebut yang paham dan tau mengenai seluk beluk pertahanan. Maka tidak heran jika terdapat aktor militer dalam tubuh lembaga negara. Dan hal tersebut tidak mengindikasikan munculnya kembali dwifungsi ABRI pada tatanan perpolitikan Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dikarenakan banyaknya aktor militer yang masuk dalam struktural kementerian pertahanan menyebabkan obstruksi lembaga sipil dalam pelaksanaannya. Dan hal tersebut dapat dilakukan demiliterisasi guna menciptakan komposisi yang ideal bagi pelaksanaan kinerja kementerian pertahanan.

LANDASAN TEORI

Penulisan artikel ini menggunakan teori relasi sipil dan militer menurut Samuel P. Huntington dalam tulisan yang berjudul *Reforming Civil-Military dalam Journal of Democracy* terbitan 1995, dapat kategorikan dengan dua cara yaitu *subjective civilian control* yaitu memperbesar kekuatan sipil dibandingkan dengan kekuasaan militer. Namun cara ini menimbulkan hubungan sipil-militer kurang sehat karena terindikasinya adanya kontrol terhadap militer dengan mempolitisasi peran militer. Yang kedua yaitu

objective civilian control yaitu pengendalian sipil melalui perbesaran profesionalisme militer namun menekan kekuasaan, hanya menekan tidak sampai menghilangkan. Dan hal ini menyebabkan hubungan antara sipil dengan militer menjadi cukup baik. Menurut Huntington dalam *objective civilian control* mengandung: 1) tingkat profesionalitas yang tinggi; 2) subordinasi yang efektif dalam tubuh militer terhadap pemimpin; 3) pengakuan dan persetujuan dari pimpinan militer mengenai kewenangan profesionalitas dan otonomi bagi militer; 4) memiliki akibat kecilnya intervensi militer dalam kontestasi politik dan menekan politisasi militer.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur yaitu memanfaatkan data-data dari jurnal-jurnal, e-book dan website yang sesuai dengan tema besar artikel yang telah dianalisis menghasilkan data yang bisa dijadikan bahan kajian dalam menyusun penelitian.

KAJIAN PUSTAKA

Pertama, penelitian dari Yusa Djuyandi dan Muhammad Gufran Ghazian yang berjudul (Kementerian Pertahanan: Birokrasi Sipil dan Hierarki Militer). Yang bertujuan untuk mengetahui distribusi kontrol masyarakat sipil yang terdapat pada struktur kementerian pertahanan. Dengan menggunakan metode kualitatif yang mampu menganalisa fenomena secara lebih mendalam. Data primer yang digunakan didapatkan dari hasil observasi maupun dari analisis dokumen-dokumen yang bisa diakses secara terbuka oleh kementerian pertahanan. Sedangkan untuk data sekunder menggunakan pemberitaan dari media-media maupun hasil dari kajian lembaga lainnya.

Kedua, tulisan karya David Setiawan, Christopher Octavianus, Demas Janis, Guguh

Winadi, Yanuar Abdullah, Taufik Umasugi dan Handika Suyuti dengan judul *Perkembangan Hubungan Militer dengan Sipil di Indonesia* yang bertujuan untuk mengetahui pola hubungan antara militer dengan masyarakat sipil. Di mana hal tersebut sangat memengaruhi terhadap profesionalitas dalam kinerja para aktor militer. Dengan berdasar pada beberapa teori, yaitu teori agensi dan HSM (Hubungan Sipil Militer) yang memiliki kesimpulan bahwa pembentukan pola hubungan sipil dengan militer yang demokratis haruslah melibatkan sipil. Dalam berbagai proses penentuan kebijakan pada wilayah pertahanan. Sehingga menciptakan hubungan harmonis antara sipil dengan militer. Hal tersebut memberikan dampak kepada peningkatan toleransi terhadap profesi dari masing-masing pihak yang seharusnya saling menghormati dan berdampingan menjaga keutuhan NKRI. Dan harapan di masa depan tidak ada rasa paling superior dalam proses pengabdian untuk negara. (Veteran & Timur, 2013).

Ketiga, penelitian dari Syamsul Hilal, Afrizal Hendra Tri Legionosuko, dan Helda Risman dalam jurnal yang berjudul “Pasang Surut Hubungan Sipil Militer di Indonesia dan Tantangannya pada masa depan NKRI” yang memiliki tujuan untuk mendeskripsikan harmonisasi serta Kerjasama hubungan sipil militer secara bersama-sama dalam rangka mencapai tujuan nasional dengan mengedepankan peran dan fungsi masing-masing. Menggunakan metode kualitatif analisis studi pustaka dari buku-buku dan jurnal. Dengan hasil bahwa hubungan sipil militer harus diatur sedemikian rupa dengan mengacu kepada kaidah-kaidah keilmuan, karena hubungan sipil militer adalah kunci utama dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan hidup suatu negara. (Hilal, Syamsul. Hendra, Afrizal. Risman, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Birokrasi Militer

Istilah birokrasi diperkenalkan oleh

filosof Perancis Baron de Grimm, Vincent de Gournay berasal dari asal kata "biro", artinya meja di belakang tempat para pejabat (pada saat itu) bekerja. Secara etimologis, kata birokrasi berasal dari kata bureau (Perancis) yang berarti "meja", dan kratos (Yunani) yang berarti "pemerintahan". Birokrasi ialah keseluruhan organisasi pemerintah yang menjalankan tugas-tugas negara dalam berbagai unit organisasi pemerintah di bawah baik departemen dan non departemen baik di pusat maupun di daerah, seperti ditingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, maupun desa atau kelurahan yang menyelenggarakan kinerja birokrasi dalam membantu negara menjalankan fungsi serta tugas masing-masing birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan Negara (Afrizal, 2018).

Birokrasi setidaknya memiliki tiga konotasi atau makna utama: salah satunya adalah pandangan konvensional bahwa Weber mendefinisikan dan mencirikan istilah tersebut sebagai model Weberian, mengacu pada organisasi apapun dalam masyarakat modern karakteristik yang diinginkan seperti kesatuan perintah, batasan hierarki yang jelas, pembagian tenaga kerja dan spesialisasi, pencatatan, dan perekrutan dan sistem kinerja promosi dan akhirnya peraturan dan regulasi yang mengatur hubungan dan kinerja mengatur (Badrullah, 2020).

Birokratisasi adalah proses yang tak terhindarkan di mana pun. Jika tidak dikontrol, birokrasi memiliki kecenderungan untuk "mengesampingkan" dan mendominasi masyarakat. Dalam pengertian ini, birokrasi juga berarti birokrasi keamanan militer. Tipe ideal birokrasi Weber adalah bentuk organisasi yang paling efisien untuk melaksanakan kebijakan dan menyelesaikan pekerjaan sebagai mesin pemerintahan. Dengan demikian, model idealnya membuka "pendekatan komparatif" terhadap metodologi strategis dalam teori pemerintahan dan organisasi (Afrizal, 2018).

Birokrasi militer adalah sistem administrasi yang diterapkan dalam organisasi militer. Ini melibatkan struktur hierarkis,

prosedur standar, peran dan tanggung jawab yang jelas, dan garis tanggung jawab yang ketat dalam organisasi militer. Tujuan dari birokrasi militer adalah untuk mengatur dan mengelola operasi militer secara efisien. Sistem ini dirancang untuk memastikan disiplin, koordinasi, dan pelaksanaan perintah yang tepat di dalam angkatan bersenjata (Setijaningrum, [a.d]).

Karakteristik utama dari birokrasi militer meliputi:

1. Struktur hirarkis: Birokrasi militer adalah struktur piramida dengan berbagai tingkatan. Ketertiban dan otoritas mengalir ke bawah, dengan setiap anggota memiliki atasan langsung.
2. Pembagian tugas: Setiap anggota birokrasi militer memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas. Pekerjaan dibagi menjadi beberapa unit dan departemen yang berbeda, yang berfungsi sesuai dengan tugas dan spesialisasi masing-masing.
3. Standarisasi prosedur: Birokrasi militer didasarkan pada prosedur standar dan aturan yang jelas. Hal ini memastikan bahwa setiap operasi dalam organisasi militer dilakukan secara konsisten dan terpadu.
4. Disiplin: Disiplin adalah prinsip penting birokrasi militer. Anggota diperintahkan untuk mematuhi aturan, perintah, dan kebijakan yang ditetapkan. Pelanggaran disiplin dapat mengakibatkan sanksi dan konsekuensi hukuman.
5. Orientasi berdasarkan pangkat: Birokrat militer menghargai pangkat dan pangkat. Pangkat militer memegang peranan penting dalam menentukan wewenang, tanggung jawab dan kekuasaan seorang prajurit.
6. Mematuhi perintah: Birokrasi militer mendorong anggotanya untuk mematuhi perintah dari atasan mereka. Kepatuhan yang ketat terhadap perintah merupakan aspek penting untuk mencapai tujuan dan keberhasilan operasi militer.

Mengenai tatanan yang ada dalam militer juga hubungan dengan kontrol sipil atas militer adalah hal yang tidak bisa

dipisahkan apalagi kondisi negara masih membutuhkan peran seimbang antara keduanya. Karena bukan hanya penjaga keamanan dari militer yang dibutuhkan namun juga kritik dan kontrol atas militer dari sipil yang mampu memberikan inovasi bagi perkembangan kebutuhan militer. Baik itu dari segi strategi dan kebutuhan alustita (Gunawan, 2017).

Bentuk Birokrasi Kemenhan

Kemertian Pertahanan (Kemenhan) adalah sebuah lembaga kementerian yang dipimpin oleh seorang menteri yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab ke presiden. Birokrasi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia memiliki struktur dan tata kerja yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2019, Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) RI No 2 Tahun 2017 tentang organisasi dan tata kerja kementerian dan pertahanan diubah menjadi Permenhan RI Nomor 14 Tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja kementerian pertahanan (Rahayu, 2021). Perubahan tersebut merupakan bentuk upaya restrukturisasi organisasi untuk mencapai organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*).

Kementerian Pertahanan adalah entitas yang bertanggung jawab atas kebijakan pertahanan negara. Sebagaimana termaktub pada Permenhan RI No. 2 Tahun 2019 pasal 3 dan 4 bahwasannya Kemenhan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Secara spesifik berlanjut pada pasal 4 yang menuliskan bahwa Kementerian Pertahanan memiliki beberapa fungsi (Kemhan, 2023);

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi pertahanan, perencanaan pertahanan, potensi pertahanan, dan kekuatan pertahanan;
- b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi

kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemenhan;

- c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenhan;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kemenhan;
- e. pelaksanaan pengelolaan sarana pertahanan;
- f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertahanan;
- g. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan;
- h. pelaksanaan pengelolaan instalasi strategis pertahanan;
- i. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
- j. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemenhan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kementerian pertahanan memiliki struktur organisasi dan birokrasi yang terdiri atas sekretaris jenderal, inspektorat jenderal, 4 bidang direktorat jenderal, badan, staff ahli dalam bidang Poleskam, berikut adalah beberapa bentuk birokrasi yang umum ditemui di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia:

- Sekretariat Jenderal: Sekretariat Jenderal bertanggung jawab dalam menyelenggarakan administrasi dan koordinasi internal di kementerian pertahanan. Tugas-tugasnya meliputi pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, perencanaan, dan pelaporan. Sekretariat Jenderal juga membantu menteri pertahanan dalam pengambilan keputusan strategis.
- Badan/biro: kementerian pertahanan juga memiliki berbagai badan/biro yang bertugas dalam bidang-bidang spesifik. Misalnya, badan litbang Kemenhan (Badan Penelitian dan Pengembangan Pertahanan) bertanggung jawab atas kegiatan riset dan pengembangan dalam bidang pertahanan. Badan Intelijen

Pertahanan (Baintel) bertugas dalam pengumpulan, analisis, dan penyampaian intelijen yang berkaitan dengan pertahanan.

- Staf/staf ahli: Staf dan staf ahli mendukung menteri pertahanan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan. Mereka menyediakan masukan dan saran berdasarkan pengetahuan dan keahlian mereka dalam bidang tertentu, seperti kebijakan strategis, hukum, keuangan, atau hubungan internasional.
- Unit Pelaksana Teknis: kementerian pertahanan juga memiliki unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas operasional. Misalnya, TNI (Tentara Nasional Indonesia) adalah institusi yang berada di bawah kementerian pertahanan dan bertanggung jawab atas pertahanan negara.

Bentuk birokrasi di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dapat mengalami perubahan sesuai dengan kebijakan dan reformasi yang dilakukan oleh pemerintah. Informasi lebih rinci mengenai struktur birokrasi terbaru dapat diperoleh melalui sumber resmi yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.¹

Dwifungsi ABRI

Dwifungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) adalah sebuah konsep yang menetapkan peran ganda militer Indonesia sebagai pemelihara ketertiban dalam negeri dan sebagai kekuatan pertahanan nasional. Konsep ini diperkenalkan pada era Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto dan memainkan peran penting dalam sejarah politik dan sosial Indonesia. Tulisan ini akan menjelaskan lebih lanjut tentang asal usul, pelaksanaan, implikasi, dan akhir dari dwifungsi ABRI.

Asal Usul Dwifungsi ABRI

Melihat kondisi sosio-politik bangsa Indonesia pada masa orde baru yang merupakan peninggalan masa dari orde lama yang terjadi banyak perjuangan dan konflik menyebabkan para tokoh untuk segera meninggalkan kebiasaan lama yang buruk dan membuat sebuah tatanan baru yang memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Yang pada sebelumnya sangat sulit untuk diwujudkan karena keterbatasan dari kekuatan sipil Indonesia.

Ide gerakan, pengertian, ciri-ciri dan hakekat orde baru sesuai dirumuskan oleh seminar II Angkatan Darat pada bulan Agustus 1966 merupakan “yang menghendaki suatu tata fikir yang lebih realistis dan pragmatis, walaupun tidak meninggalkan idealis perjuangan lama. Orde baru menghendaki diutamakan kepentingan nasional, walaupun tidak meninggalkan ideologi perjuangan anti kolonialisme dan anti imperealisme” (Prihatanti et al., 2013).

Dwifungsi ABRI muncul pada tahun 1960-an sebagai respons terhadap situasi politik dan keamanan yang kompleks di Indonesia pada saat itu. Ancaman dari PKI (Partai Komunis Indonesia) dan konflik bersenjata di beberapa daerah membuat pemerintah merasa perlu untuk memperluas peran militer. pada tahun 1965. Soeharto berhasil mengambil alih kekuasaan setelah G30S/PKI (Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia) dan membentuk orde baru yang berkuasa selama lebih dari tiga dekade. Dwifungsi ABRI menjadi doktrin resmi negara dalam rangka menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional.

Kebijakan ini berasal dari gagasan A.H Nasution yang disebut sebagai jalan tengah atas permasalahan yang terjadi, dan pada perkembangannya kebijakan dwifungsi bisa dianggap sebagai pembenaran bagi pemerintahan soeharto untuk menempatkan

¹ <https://www.kemhan.go.id/> diakses pada tgl 24 Mei 2023 pk1 23.30 WIB

aktor militer pada kursi-kursi dewan dan kementerian yang pada saat itu diisi oleh pihak kurang cakap. Dan hal ini menjadi poros utama kekuatan atas kekuasaan Soeharto (Firdaus, 2013).

Meskipun nama dwifungsi ABRI ini diperkenalkan dan pelaksanaannya pada saat orde baru, sejatinya keikutsertaan militer dalam bidang sosial politik sudah terjadi sejak demokrasi terpimpin atau orde lama, dengan alasan terjadinya kegagalan dari sipil dalam merumuskan ideologi negara yang tidak adanya kesepakatan antar partai di dalam sidang konstituante. Menurut Soekarno hal ini berdampak buruk terhadap stabilitas politik nasional dan merusak keutuhan negara. Sehingga untuk mengimbangi peran sipil yang kurang optimal tersebut, Soekarno memasukkan beberapa aktor militer dalam structural politik (Anwar, 2020).

Pelaksanaan Dwifungsi ABRI

Dwifungsi ABRI memberikan peran yang luas kepada militer dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi Indonesia. Selain tanggung jawab dalam pertahanan nasional dan keamanan eksternal, ABRI juga terlibat dalam penindakan terhadap gerakan separatis, pengamanan pemilihan umum, dan penegakan hukum. Di sisi lain, militer juga ikut serta dalam pembangunan infrastruktur, proyek-proyek nasional, serta kegiatan sosial dan ekonomi lainnya. Keikutsertaan ABRI dalam sektor sipil mencerminkan peran ganda mereka sebagai pelindung dan pelayan masyarakat.

Dampak dan Kontroversi Dwifungsi ABRI

Dwifungsi ABRI memiliki implikasi yang kompleks dan kontroversial. Di satu sisi, peran luas ABRI dalam kehidupan sosial dan ekonomi memungkinkan mereka untuk berkontribusi secara positif terhadap pembangunan nasional. Militer dapat membantu membangun infrastruktur, memberikan bantuan kemanusiaan, dan

melindungi warga negara dari ancaman dalam negeri. Nilai positif lain yang dimunculkan dari kebijakan dwifungsi ABRI adalah sebagai penyelamat negara dan penjaga ideologi negara, dan hal ini masuk ke dalam salah satu poin sebagai justifikasi peran militer dalam bidang sosial politik, dan keikutsertaan dalam perumusan kebijakan yang diterapkan (Leni, 2013). Namun di sisi lain, keberadaan dwifungsi ABRI juga menciptakan peluang penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Keterlibatan ABRI dalam politik juga mengaburkan batas antara militer dan pemerintah sipil, yang seharusnya independen satu sama lain.

Masa Berakhirnya Dwifungsi ABRI

Pada tahun 1998, dwifungsi ABRI secara resmi dihapuskan sebagai hasil dari reformasi yang dipicu oleh protes massa dan tuntutan masyarakat untuk perubahan politik. Penghapusan ini menandai pergeseran paradigma dalam sistem politik Indonesia, dengan menempatkan penekanan yang lebih besar pada supremasi sipil, demokrasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Setelah penghapusan dwifungsi ABRI, Angkatan Bersenjata Indonesia berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang fokus pada tugas-tugas pertahanan nasional dan tidak lagi terlibat secara langsung dalam politik dan pemerintahan sipil.

Dwifungsi ABRI adalah konsep yang memberikan peran ganda kepada militer Indonesia sebagai pemelihara ketertiban dalam negeri dan kekuatan pertahanan nasional. Meskipun konsep ini sudah dihapuskan, sejarah dan implikasi dari dwifungsi ABRI masih memberikan pemahaman penting tentang perkembangan politik dan sosial di Indonesia. Saat ini, peran TNI sebagai kekuatan pertahanan nasional dan pengabdian kepada negara tetap penting, selama tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, supremasi sipil, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

SIMPULAN DAN SARAN

Meskipun dalam batang tubuh kementerian terdapat adanya aktor militer hal ini tidak adanya yang mengindikasikan bahwa dwifungsi ABRI akan ada season 2 nya, namun hal ini dilakukan agar fungsi yang dijalankan oleh kementerian sesuai dan tepat sasaran jika yang menjalankan memiliki pengalaman dan paham mengenai seluk beluk pertahanan, dan dalam menyuplai kebutuhan angkatan militer dalam menjalankan fungsi sebagai penjaga pertahanan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, D. (2018). Analisis Kinerja Birokrasi Publik pada Dinas Sosial Kota Dumai. *Sorot*, 13(1), 53. <https://doi.org/10.31258/sorot.13.1.5655>
- Anwar, A. (2020). Dwi Fungsi ABRI: Melacak Sejarah Keterlibatan ABRI dalam Kehidupan Sosial Politik dan Perekonomian Indonesia. *Jurnal Adabiya*, 20(1), 23. <https://doi.org/10.22373/adabiya.v20i1.6776>
- Badrullah. (2020). Jurnal Sipatokkong BPSDM Sulawesi Selatan. *Jurnal Sipatokkong BPSDM Sulawesi Selatan*, 1(2), 137–142.
- Firdaus, D. W. (2013). Kebijakan Dwifungsi Abri dalam Perluasan Peran Militer di Bidang Sosial-Politik Tahun 1965-1998. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Gunawan, A. B. (2017). Kontrol Sipil atas Militer dan Kebijakan Pertahanan di Indonesia Pasca Orde Baru. *Jurnal Politik*, 2(2), 197. <https://doi.org/10.7454/jp.v2i2.117>
- Hasudungan, A. N. (2021). Dwifungsi ABRI dalam Politik Indonesia sebagai Materi Pengayaan Pembelajaran Sejarah Indonesia Kelas XII. *Tarikhuna: Journal of History and History Education*, 3(2), 164–178. <https://doi.org/10.15548/thje.v3i2.3064>
- Hilal, Syamsul. Hendra, Afrizal. Risman, H. (2022). Pasang Surut Hubungan Sipil Militer di Indonesia dan Tantangannya Pada Masa Depan NKRI. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 2(10), 3549–3550.
- Leni, N. (2013). Keterlibatan Militer dalam Kacah Politik di Indonesia. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 9(1), 45.
- Prihatanti, Maskun, & M, S. (2013). Tinjauan Historis tentang Keterlibatan Militer dalam Pemerintahan Soeharto pada Masa Awal Orde Baru. *Politik Orde Baru*, 1, 2.
- Veteran, U. P. N., & Timur, J. (2013). *Dengan Sipil di Indonesia*. 1(1), 74–83.
- Ghazian, Y. D. (2019). Kementerian Pertahanan: Birokrasi Sipil Dan Hierarki Militer . *Wacana Publik Vol.13, No. 1*, 7-12.
- Indonesia, K. P. (2019, Maret 21). *Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia*. Retrieved from [kemhan.go.id: https://www.kemhan.go.id/puslapbinkuhan/wp-content/uploads/2019/06/Permenhan-no-14-tahun-2019.pdf](https://www.kemhan.go.id/puslapbinkuhan/wp-content/uploads/2019/06/Permenhan-no-14-tahun-2019.pdf)
- Rahayu, D. D. (2021). Pengaruh Budaya Organisasi, Tim Kerja Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai Ditkersinhan Ditjen Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI. *Jurnal Ilmiah Manajemen Surya Pasca Scientia, Volume 10 Nomor 2*, 39-59.
- Erna Setijaningrum, S.I.P, Msi, 'Inovasi Pelayanan Publik,' PR.Medika Aksara Gtobatindo